

Community Development dalam Pendidikan: Strategi Membangun Partisipasi Masyarakat yang Berkelanjutan

Refalia Zahirah¹, Kofifah Andini¹, Cheryn L. Simanjuntak¹, Muhammad Ihsan Kamil¹

¹Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

Community participation in educational development is often limited to program implementation, while identification, planning, decision-making, and evaluation remain dominated by governments or external institutions. This condition weakens community ownership and threatens program sustainability. This study examines how community development can foster sustainable community participation in education and identifies the factors shaping its implementation. An integrative literature review combined with a secondary case-study synthesis was employed. Relevant academic literature on community development, community education, empowerment, participation, and program sustainability was reviewed, alongside three Indonesian cases representing different patterns of community participation: Kampung Inggris in Kediri, village tourism development in Ponorogo, and KUPS Wisata Rengganis in Jember. The analysis indicates that sustainable participation depends not merely on the extent of community involvement but on the degree to which communities possess access to decision-making, participatory capacity, legitimacy, ownership, and control over programs. Kampung Inggris demonstrates relatively strong community-led participation and institutional sustainability, whereas the other cases reveal continuing dependence on government support, organizational capacity constraints, or limited community control. The findings suggest that community development in education requires a shift from administrative and instrumental participation toward substantive participation throughout needs identification, planning, implementation, evaluation, institutionalization, and community self-reliance. A collaborative governance model in which government and educational institutions function as facilitators while communities retain meaningful decision-making authority offers a stronger foundation for sustainable educational development.

 OPEN ACCESS

ARTICLE HISTORY

Received: 01-08-2026

Revised: 17-08-2026

Accepted: 22-08-2026

KEYWORDS

community development, community participation, community empowerment, community education, sustainable participation, educational management

Corresponding Author:

Refalia Zahirah

Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Email: refaliazhrh@gmail.com

Pendahuluan

Berbagai program pendidikan masyarakat di Indonesia pada dasarnya dirancang untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan. Namun, dalam praktiknya, banyak program yang mengatasnamakan partisipasi masyarakat masih menempatkan masyarakat hanya sebagai peserta atau penerima manfaat, bukan sebagai aktor yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat umumnya terbatas pada tahap pelaksanaan program, sedangkan proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, dan evaluasi masih didominasi oleh pemerintah atau lembaga penyelenggara. Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya rasa memiliki (*ownership*) masyarakat terhadap program sehingga keberlanjutan program sering kali sulit dipertahankan setelah dukungan eksternal berakhir (Saepudin & Mulyono, 2019; Sucipto *et al.*, 2024).

Permasalahan tersebut terlihat pada berbagai program pendidikan berbasis masyarakat yang menunjukkan tingkat partisipasi yang berbeda-beda. Penelitian M. Yusuf Syaifudin dan M. Farid Ma'ruf (2022) menunjukkan bahwa dalam pengembangan desa wisata, masyarakat masih cenderung pasif sehingga pemerintah menjadi aktor yang dominan dalam pelaksanaan program. Sebaliknya, penelitian Murdiana Asih Heningtyas *et al.* (2014) tentang Kampung Inggris di Kabupaten Kediri memperlihatkan bahwa keterlibatan masyarakat yang tinggi sejak tahap perencanaan hingga pengembangan program mampu menciptakan dampak pendidikan dan ekonomi yang berkelanjutan. Sementara itu, studi mengenai KUPS Wisata Rengganis di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat telah berkembang cukup baik, namun masih menghadapi kendala pada aspek tata kelola organisasi dan pengembangan sumber daya manusia yang mempengaruhi keberlanjutan program (Puteri & Puspaningrum, 2024).

Perbedaan kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program pendidikan berbasis masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program itu sendiri, tetapi juga oleh kualitas partisipasi yang dibangun. Partisipasi yang hanya bersifat administratif atau instrumental cenderung menghasilkan keterlibatan jangka pendek karena masyarakat tidak memiliki kontrol terhadap program yang dijalankan. Sebaliknya, partisipasi substantif yang melibatkan masyarakat dalam seluruh siklus program mampu membangun kapasitas kolektif, rasa memiliki, serta komitmen untuk mempertahankan keberlanjutan program. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses sosial yang memungkinkan masyarakat belajar, berorganisasi, dan mengembangkan kemampuan untuk mengelola perubahan secara mandiri (Mubarak, 2024; Juabdin Sada, 2017).

Salah satu pendekatan yang relevan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah *community development* atau pengembangan masyarakat. *Community development* merupakan pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek

utama melalui proses partisipatif, penguatan kapasitas, dan pemberdayaan berkelanjutan (Nasdian, 2014; Zubaedi, 2016). Pendekatan ini menekankan bahwa masyarakat tidak hanya dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, tetapi juga memiliki akses, kapasitas, legitimasi, dan kontrol terhadap proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan demikian, *community development* berpotensi menjadi pendekatan strategis dalam membangun partisipasi masyarakat yang berkelanjutan dalam bidang pendidikan.

Meskipun demikian, kajian mengenai *community development* dan pendidikan selama ini masih cenderung berkembang secara terpisah. Sebagian penelitian berfokus pada konsep dan praktik pengembangan masyarakat, sementara penelitian lain lebih menyoroti pendidikan masyarakat sebagai sarana pemberdayaan. Kajian yang secara khusus menjelaskan bagaimana pendekatan *community development* dapat membangun partisipasi masyarakat yang berkelanjutan dalam pendidikan masih relatif terbatas. Akibatnya, belum banyak penelitian yang menjelaskan mekanisme bagaimana masyarakat dapat bertransformasi dari sekadar peserta program menjadi aktor yang memiliki kapasitas, legitimasi, dan kontrol dalam seluruh proses pendidikan masyarakat (Saepudin & Mulyono, 2019; Sucipto *et al.*, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini berargumen bahwa partisipasi masyarakat yang berkelanjutan hanya dapat terbentuk apabila masyarakat memiliki akses terhadap proses pengambilan keputusan, kapasitas untuk berpartisipasi, legitimasi untuk menyuarakan kepentingannya, serta kontrol terhadap pelaksanaan dan keberlanjutan program pendidikan. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur dan sintesis beberapa studi kasus pengembangan masyarakat berbasis pendidikan di Indonesia, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *community development* dapat menjadi strategi dalam membangun partisipasi masyarakat yang berkelanjutan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasinya dalam bidang pendidikan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian literatur integratif (*integrative literature review*) yang dipadukan dengan sintesis studi kasus sekunder. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis bagaimana *community development* dalam pendidikan dapat membangun partisipasi masyarakat yang berkelanjutan melalui pengkajian berbagai konsep, hasil penelitian, dan praktik implementasi yang telah dilakukan sebelumnya. Kajian literatur memungkinkan peneliti mengintegrasikan berbagai temuan penelitian sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara *community development*, pendidikan masyarakat, partisipasi, dan keberlanjutan program (Hermawan & Suryono, 2016)

Sumber data penelitian berasal dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen yang relevan dengan tema *community development*

dan pendidikan masyarakat. Literatur diperoleh melalui penelusuran pada Google Scholar, Garuda, dan berbagai jurnal ilmiah nasional yang membahas pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pendidikan masyarakat, partisipasi masyarakat, dan manajemen pendidikan. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan relevansi topik, kredibilitas publikasi, serta keterkaitannya dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber ilmiah yang relevan, baik referensi konseptual seperti Nasdian (2014), Zubaedi (2013), dan Muslim (2009), maupun penelitian empiris dalam sepuluh tahun terakhir untuk memperkuat analisis mengenai partisipasi masyarakat yang berkelanjutan dalam pendidikan (Hermawan & Suryono, 2016).

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi: (1) artikel atau buku yang membahas *community development*, pendidikan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, atau keberlanjutan program; (2) sumber ilmiah yang memiliki relevansi dengan konteks pendidikan formal, non formal, maupun pemberdayaan komunitas berbasis pendidikan; dan (3) penelitian yang memuat praktik implementasi *community development* di Indonesia. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup sumber yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tema penelitian, artikel populer non ilmiah, serta penelitian yang tidak menjelaskan aspek partisipasi masyarakat secara jelas. Penetapan kriteria tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa sumber yang digunakan memiliki relevansi, kredibilitas, dan kesesuaian dengan tujuan penelitian sehingga dapat mendukung proses analisis secara komprehensif (Hermawan & Suryono, 2016).

Studi literatur dalam penelitian ini juga dilakukan dengan menelaah berbagai penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan dan pendidikan masyarakat. Melalui kajian tersebut, peneliti dapat memahami tahapan partisipasi masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat, serta strategi pemberdayaan yang digunakan dalam pengembangan masyarakat. Pendekatan ini membantu peneliti dalam menganalisis keterkaitan antara *community development* dan pendidikan sebagai proses yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam pembangunan sosial. Dengan demikian, penggunaan studi literatur memungkinkan penelitian memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (Hermawan & Suryono, 2016).

Selain kajian konseptual, penelitian ini juga menggunakan sintesis studi kasus sekunder yang bersumber dari penelitian terdahulu, yaitu Kampung Inggris di Kabupaten Kediri (Heningtyas et al., 2014), pengembangan desa wisata (Syaifudin & Ma'ruf, 2022) dan KUPS Wisata Rengganis di Kabupaten Jember (Puteri & Puspaningrum, 2024). ketiga studi kasus tersebut dipilih karena merepresentasikan variasi bentuk partisipasi masyarakat, peran pemerintah, dan keberlanjutan program dalam implementasi *community development*. Seluruh studi kasus dianalisis sebagai data sekunder untuk mengidentifikasi pola, persamaan, dan perbedaan implementasi *community*

development dalam konteks pendidikan, bukan sebagai hasil observasi langsung peneliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti melakukan sintesis terhadap berbagai temuan penelitian sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang dikaji (Hermawan & Suryono, 2016).

Hasil dan Diskusi

1. Pengertian dan Tujuan Pengembangan Masyarakat

Community development atau pengembangan masyarakat merupakan pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses perubahan sosial melalui keterlibatan aktif, peningkatan kapasitas, serta penguatan kemandirian masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan, tetapi juga pada proses pemberdayaan yang memungkinkan masyarakat memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan, mengelola sumber daya, serta mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sendiri (Nasdian, 2014; Zubaedi, 2016). Dengan demikian, inti dari *community development* terletak pada empat unsur utama, yaitu partisipasi aktif masyarakat, kontrol masyarakat terhadap program, peningkatan kapasitas individu dan kelompok, serta keberlanjutan perubahan yang dihasilkan.

Dalam perspektif pendidikan, *community development* menjadi pendekatan yang penting karena pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Melalui pendidikan, masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran kritis, serta kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sosial secara lebih mandiri (Saepudin & Mulyono, 2019). Oleh karena itu, pendidikan berbasis *community development* tidak menempatkan masyarakat sebagai objek penerima layanan pendidikan, melainkan sebagai subjek yang terlibat dalam menentukan kebutuhan belajar, merancang program, melaksanakan kegiatan, hingga mengevaluasi hasil yang dicapai.

Tujuan utama *community development* dalam pendidikan adalah membangun kapasitas masyarakat agar mampu mengelola dan mengembangkan program pendidikan secara mandiri dan berkelanjutan. Menurut Ife (1997) dalam Zubaedi (2016), pengembangan masyarakat bertujuan menciptakan struktur sosial yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara demokratis dalam pengambilan keputusan serta memiliki akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam konteks pendidikan, tujuan tersebut diwujudkan melalui penguatan kapasitas belajar masyarakat, peningkatan partisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, serta pengembangan kelembagaan lokal yang mampu mendukung keberlanjutan program pendidikan.

Dengan demikian, keberhasilan *community development* dalam pendidikan tidak hanya diukur dari jumlah program yang dilaksanakan atau banyaknya peserta yang

terlibat, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memiliki rasa kepemilikan (*ownership*), kemampuan kolektif, dan kontrol terhadap program yang dijalankan. Ketika masyarakat terlibat secara substantif dalam seluruh siklus program pendidikan, maka partisipasi yang terbentuk tidak lagi bersifat administratif atau sementara, melainkan berkembang menjadi partisipasi berkelanjutan yang mampu mendukung proses pemberdayaan masyarakat dalam jangka panjang (Normina, 2016; Juabdin Sada, 2017).

2. Analisis Masalah

Salah satu isu utama dalam pendidikan yang berbasis masyarakat adalah program yang dirancang secara umum dan kurang memperhatikan kebutuhan setempat. Banyak inisiatif pendidikan masyarakat dibuat dengan pendekatan yang sama tanpa memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya dari komunitas yang dituju. Akibatnya, program-program ini sering tidak mampu memenuhi kebutuhan nyata masyarakat dan hanya menghasilkan partisipasi yang bersifat sementara. Situasi ini mengindikasikan adanya perbedaan antara tujuan pendidikan masyarakat sebagai alat pemberdayaan dan pelaksanaan nyatanya di lapangan (Saepudin dan Mulyono, 2019; Sucipto et al. , 2024).

Selain isu desain program, keterlibatan masyarakat juga merupakan tantangan yang signifikan. Dalam banyak proyek, masyarakat biasanya diundang hanya sebagai peserta, bukan sebagai pengambil keputusan. Partisipasi yang ada seringkali terbatas pada fase pelaksanaan, sementara langkah-langkah seperti identifikasi masalah, perencanaan, dan penilaian masih lebih banyak dikuasai oleh pihak luar. Pola yang bersifat dari atas ke bawah ini membuat masyarakat merasa tidak memiliki hak kepemilikan terhadap program, sehingga partisipasi yang terjadi cenderung bersifat administratif dan tidak berkelanjutan (Hermawan dan Suryono, 2016; Normina, 2016).

Permasalahan selanjutnya berhubungan dengan elemen kelembagaan. Kerjasama antar lembaga pendidikan, pemerintah, komunitas, dan pihak-pihak lain masih tergolong lemah. Banyak program yang beroperasi secara terpisah dan belum terhubung dalam konteks pengembangan masyarakat yang berkelanjutan. Sebagai akibatnya, dukungan dari kebijakan, pembiayaan, pendampingan, dan evaluasi program sering kali tidak dilakukan secara berkesinambungan. Situasi ini membuat program pendidikan masyarakat sulit untuk berkembang menjadi gerakan pemberdayaan yang dapat menghasilkan perubahan sosial yang berkelanjutan (Agustana, 2020; Juabdin Sada, 2017).

Selain itu, keterbatasan dalam kapasitas sumber daya manusia juga menjadi tantangan. Baik fasilitator maupun masyarakat umumnya belum memiliki keahlian yang cukup untuk merancang, mengelola, dan mengembangkan program dengan mandiri. Keterbatasan dalam kapasitas ini mempengaruhi rendahnya inovasi dalam program serta kurang efektifnya proses pembelajaran sosial yang seharusnya menjadi fokus utama

dalam pengembangan komunitas. Sebenarnya, keberhasilan program sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya dan membuat keputusan dengan mandiri (Nasdian, 2014; Zubaedi, 2016).

Berbagai isu tersebut pada akhirnya berkaitan dengan masalah keberlangsungan program. Banyak kegiatan pendidikan masyarakat masih fokus pada jangka pendek dan belum memiliki mekanisme tindak lanjut yang jelas. Akibatnya, efek program tidak bertahan lama, partisipasi masyarakat menurun setelah program selesai, dan pendidikan belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pengembangan komunitas yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan berkelanjutan agar masyarakat memiliki akses, kapasitas, serta pengendalian yang lebih besar terhadap program pendidikan yang dilaksanakan.

3. Argumentasi Kritis

Salah satu persoalan mendasar dalam implementasi community development di bidang pendidikan adalah masih dominannya bentuk partisipasi yang bersifat administratif dan instrumental dibandingkan partisipasi substantif. Partisipasi administratif terjadi ketika masyarakat hanya hadir dalam forum, musyawarah, atau kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga pendidikan tanpa memiliki pengaruh yang nyata terhadap proses pengambilan keputusan. Sementara itu, partisipasi instrumental muncul ketika masyarakat dilibatkan sebagai pelaksana program atau penyedia sumber daya, tetapi tidak memiliki kontrol terhadap arah, tujuan, dan keberlanjutan program tersebut. Kondisi ini menyebabkan masyarakat lebih banyak berfungsi sebagai pelengkap program daripada sebagai aktor pembangunan yang memiliki kewenangan untuk menentukan kebutuhannya sendiri.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masalah utama dalam community development bukan hanya rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, melainkan juga ketimpangan relasi kekuasaan antara pihak perancang program dan masyarakat penerima program. Banyak program pendidikan masyarakat masih dirancang secara top-down, di mana pemerintah, lembaga pendidikan, atau organisasi eksternal menentukan agenda, tujuan, dan indikator keberhasilan tanpa melibatkan masyarakat secara bermakna. Akibatnya, masyarakat hanya menjadi objek implementasi kebijakan. Dalam situasi seperti ini, partisipasi yang muncul cenderung bersifat semu karena kehadiran masyarakat tidak disertai dengan kemampuan untuk memengaruhi keputusan yang menentukan kehidupan mereka sendiri.

Berbeda dengan partisipasi administratif dan instrumental, partisipasi substantif menempatkan masyarakat sebagai pemegang peran utama dalam keseluruhan proses pembangunan. Masyarakat tidak hanya terlibat dalam pelaksanaan program, tetapi juga dalam identifikasi masalah, perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengembangan keberlanjutan program. Partisipasi substantif

memungkinkan masyarakat memiliki kontrol terhadap sumber daya, menentukan prioritas kebutuhan, serta mengembangkan kapasitas kolektif untuk mengelola perubahan sosial secara mandiri. Dalam perspektif community development, bentuk partisipasi inilah yang menjadi dasar terciptanya pemberdayaan dan kemandirian masyarakat yang sesungguhnya.

Perbedaan tingkat partisipasi tersebut dapat dilihat pada berbagai kasus yang telah dikaji. Pada kasus pengembangan desa wisata di Kabupaten Ponorogo, masyarakat memang telah dilibatkan dalam berbagai kegiatan pengembangan desa, namun keterlibatan tersebut masih perlu diperkuat karena sebagian besar inisiatif, perencanaan, dan penggerak utama program masih berasal dari pemerintah desa. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menunjukkan bahwa partisipasi yang terjadi belum sepenuhnya mencapai level substantif. Masyarakat masih berperan sebagai pelaksana program, sementara kontrol terhadap arah pembangunan belum sepenuhnya berada di tangan masyarakat.

Sebaliknya, Kampung Inggris di Kabupaten Kediri menunjukkan bentuk partisipasi yang lebih substantif. Keberhasilan Kampung Inggris tidak lahir dari intervensi pemerintah yang dominan, melainkan dari inisiatif masyarakat yang secara mandiri membangun lembaga kursus, mengembangkan metode pembelajaran, menyediakan fasilitas pendukung, serta menciptakan berbagai inovasi pendidikan yang berkelanjutan. Dalam kasus ini, masyarakat memiliki ownership yang kuat terhadap program yang dijalankan. Rasa memiliki tersebut mendorong munculnya tanggung jawab kolektif untuk menjaga kualitas, mengembangkan inovasi, dan memastikan keberlanjutan program tanpa ketergantungan yang tinggi pada pihak eksternal.

Sementara itu, kasus KUPS Wisata Rengganis menunjukkan posisi yang berada di antara kedua kondisi tersebut. Masyarakat telah berpartisipasi dalam pengelolaan wisata dan pengambilan keputusan organisasi, namun masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam aspek tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan kelembagaan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya berkembang menjadi kapasitas kolektif yang mampu menopang keberlanjutan program secara mandiri. Tanpa penguatan kelembagaan dan peningkatan kompetensi anggota, partisipasi yang telah terbentuk berisiko mengalami stagnasi.

Dari ketiga kasus tersebut terlihat bahwa keberhasilan community development tidak ditentukan oleh seberapa banyak masyarakat dilibatkan dalam kegiatan, tetapi oleh sejauh mana masyarakat memiliki kontrol terhadap proses pembangunan. Oleh karena itu, transformasi dari partisipasi semu menuju partisipasi berkelanjutan harus dilakukan melalui penguatan kontrol masyarakat terhadap pengambilan keputusan, pembangunan rasa memiliki (ownership), peningkatan kapasitas kolektif, serta pembentukan kelembagaan lokal yang mampu mengelola program secara mandiri. Dengan demikian,

masyarakat tidak hanya menjadi peserta program, tetapi juga menjadi pemilik dan penggerak utama pembangunan.

Dalam konteks pendidikan, keberlanjutan partisipasi hanya dapat terwujud apabila lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat membangun hubungan yang lebih setara. Pendidikan harus diposisikan sebagai ruang pemberdayaan yang memungkinkan masyarakat mengidentifikasi kebutuhannya sendiri, menyusun solusi secara kolektif, dan mengelola sumber daya yang dimiliki. Ketika masyarakat memiliki kapasitas, legitimasi, dan kewenangan dalam setiap tahapan pembangunan, maka community development tidak lagi menghasilkan partisipasi yang bersifat sementara, melainkan partisipasi substantif yang mampu memperkuat kemandirian sosial, keberlanjutan kelembagaan, dan pembangunan masyarakat dalam jangka panjang.

4. Tahapan atau Proses Pengembangan Masyarakat

Menurut Nasdian (2014), pengembangan masyarakat merupakan proses yang berlangsung secara bertahap, sistematis, dan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan. Dalam konteks pendidikan, tahapan pengembangan masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai prosedur pelaksanaan program, tetapi juga dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai kualitas partisipasi masyarakat dalam setiap proses pendidikan. Melalui kerangka ini dapat diketahui sejauh mana masyarakat memiliki peran dalam mengidentifikasi kebutuhan, merencanakan program, melaksanakan kegiatan, mengevaluasi hasil, hingga mengelola program secara mandiri dan berkelanjutan.

Tahap pertama adalah identifikasi masalah dan potensi masyarakat. Menurut Mustanir et al., proses ini bertujuan untuk memahami kondisi masyarakat sekaligus mengidentifikasi berbagai potensi yang dapat dikembangkan melalui program pemberdayaan. Dalam pendidikan, tahap ini berkaitan dengan pemetaan kebutuhan belajar masyarakat, karakteristik peserta didik, serta potensi lokal yang dapat menjadi sumber belajar. Saepudin dan Mulyono (2019) menegaskan bahwa banyak program pendidikan masyarakat kurang efektif karena tidak berangkat dari kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, kualitas identifikasi kebutuhan menjadi indikator awal keberhasilan suatu program. Jika dianalisis melalui studi kasus, Kampung Inggris menunjukkan proses identifikasi yang kuat karena lahir dari kebutuhan masyarakat terhadap kemampuan berbahasa Inggris yang memiliki nilai sosial dan ekonomi tinggi. Sebaliknya, pada pengembangan desa wisata, kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya menjadi dasar program karena arah pengembangan masih banyak ditentukan oleh pemerintah desa. Sementara itu, KUPS Wisata Rengganis menunjukkan upaya identifikasi potensi yang cukup baik melalui pemanfaatan sumber daya hutan dan wisata alam sebagai aset utama pengembangan masyarakat.

Tahap kedua adalah perencanaan partisipatif. Hamid (2018) menjelaskan bahwa masyarakat perlu dilibatkan dalam penyusunan tujuan, strategi, serta bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam konteks pendidikan, perencanaan partisipatif berarti masyarakat ikut menentukan bentuk program pembelajaran, metode yang digunakan, serta tujuan yang ingin dicapai. Tahap ini menjadi penting karena menunjukkan apakah masyarakat hanya menjadi penerima program atau turut menentukan arah program tersebut. Pada kasus Kampung Inggris, masyarakat tidak hanya menerima program yang telah dirancang pihak lain, tetapi secara aktif mengembangkan lembaga kursus, metode pembelajaran, serta sistem asrama yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sebaliknya, pada kasus desa wisata, ruang masyarakat dalam menentukan arah program masih relatif terbatas karena pemerintah desa tetap menjadi aktor dominan dalam proses perencanaan. Sementara itu, pada KUPS Wisata Rengganis, masyarakat telah dilibatkan dalam perencanaan program wisata dan kegiatan ekonomi produktif, meskipun kapasitas kelembagaan dalam menyusun strategi jangka panjang masih perlu diperkuat.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan program. Menurut Hamid (2018), masyarakat seharusnya berperan sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan program, sedangkan fasilitator berfungsi sebagai pendamping. Dalam program pendidikan, masyarakat tidak hanya menjadi peserta pembelajaran, tetapi juga menjadi penyelenggara, pengelola, dan pengembang program. Dari perspektif ini, Kampung Inggris memperlihatkan tingkat partisipasi yang sangat tinggi karena masyarakat terlibat langsung sebagai pengelola lembaga kursus, pengajar, penyedia fasilitas asrama, serta pelaku usaha yang mendukung kegiatan pendidikan. Pada KUPS Wisata Rengganis, masyarakat juga menjadi aktor utama dalam pengelolaan wisata dan kegiatan ekonomi berbasis komunitas. Namun, pada kasus desa wisata, sebagian masyarakat masih berperan sebagai pelaksana kegiatan yang telah dirancang pemerintah desa sehingga partisipasi yang terbentuk belum sepenuhnya mencerminkan kemandirian masyarakat.

Tahap keempat adalah monitoring dan evaluasi partisipatif. Menurut Mustanir et al., monitoring dan evaluasi tidak hanya berfungsi mengukur keberhasilan program, tetapi juga menjadi sarana refleksi masyarakat terhadap manfaat dan kendala yang dihadapi selama program berlangsung. Dalam konteks pendidikan, keterlibatan masyarakat dalam evaluasi memungkinkan program terus disesuaikan dengan kebutuhan belajar yang berkembang. Sucipto *et al.* (2024) menjelaskan bahwa keberlanjutan program pendidikan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses penilaian dan perbaikan program. Namun, dalam banyak program pemberdayaan, evaluasi masih didominasi oleh lembaga pelaksana sehingga masyarakat hanya menjadi objek penilaian. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi masih menjadi tantangan dalam berbagai program community development.

Tahap kelima adalah pemantapan hasil melalui pelembagaan program. Hamid (2018) menjelaskan bahwa hasil program perlu diperkuat melalui pembentukan sistem dan kelembagaan yang mampu menjaga keberlanjutannya. Dalam pendidikan, pelembagaan dapat diwujudkan melalui terbentuknya organisasi masyarakat, komunitas belajar, jaringan pendidikan, atau lembaga yang mampu mengelola program secara berkelanjutan. Jika dibandingkan dengan dua kasus lainnya, Kampung Inggris menunjukkan tingkat pelembagaan yang paling kuat karena telah berkembang menjadi ekosistem pendidikan yang didukung oleh ratusan lembaga kursus, jaringan usaha lokal, dan dukungan masyarakat yang luas. Sebaliknya, desa wisata dan KUPS Wisata Rengganis masih menghadapi tantangan dalam aspek tata kelola organisasi, kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan kelembagaan yang menopang keberlanjutan program.

Tahap terakhir adalah pemandirian masyarakat atau terminasi. Menurut Mustanir *et al.*, tahap ini ditandai oleh kemampuan masyarakat untuk mengambil keputusan, mengelola sumber daya, serta mempertahankan program tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap pihak luar. Dalam pendidikan, pemandirian terlihat ketika masyarakat mampu mengembangkan program pembelajaran secara mandiri dan menyesuaikannya dengan kebutuhan yang terus berkembang. Dari ketiga kasus yang dianalisis, Kampung Inggris merupakan contoh yang paling mendekati tahap pemandirian karena pengembangan program pendidikan nonformal lebih banyak digerakkan oleh masyarakat daripada pemerintah. Sebaliknya, desa wisata dan KUPS Wisata Rengganis masih memerlukan penguatan kapasitas organisasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan penguatan kelembagaan agar mampu mencapai tingkat kemandirian yang lebih tinggi.

Melalui kerangka analisis ini terlihat bahwa partisipasi masyarakat yang berkelanjutan tidak dibangun hanya pada tahap pelaksanaan program, melainkan sejak identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pelembagaan dan pemandirian masyarakat. Jika dibandingkan, Kampung Inggris menunjukkan keterlibatan masyarakat yang relatif kuat pada seluruh tahapan sehingga mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. Sementara itu, desa wisata dan KUPS Wisata Rengganis telah menunjukkan praktik partisipatif yang positif, tetapi masih menghadapi tantangan pada aspek kelembagaan, kapasitas kolektif, dan kemandirian masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan *community development* dalam pendidikan tidak hanya ditentukan oleh jumlah masyarakat yang terlibat, tetapi oleh sejauh mana masyarakat memiliki kontrol, kapasitas, dan rasa memiliki terhadap program yang dijalankan sehingga partisipasi yang terbentuk dapat bertahan dalam jangka panjang.

5. Peran Pemerintah dan Masyarakat

Keberhasilan *community development* dalam pendidikan sangat dipengaruhi oleh pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam proses perencanaan,

pelaksanaan, hingga keberlanjutan program. Dalam praktiknya, terdapat beberapa model partisipasi yang menunjukkan tingkat keterlibatan masyarakat yang berbeda-beda, yaitu model pemerintah dominan, model masyarakat dominan, dan model kolaboratif. Perbedaan pola tersebut memengaruhi tingkat kepemilikan masyarakat terhadap program serta keberlanjutan hasil yang dicapai (Nasdian, 2014; Zubaedi, 2016).

Model pemerintah dominan terlihat dalam penelitian M. Yusuf Syaifudin dan M. Farid Ma'ruf (2022) mengenai pengembangan desa wisata di Desa Jurug, Kabupaten Ponorogo. Dalam model ini, pemerintah desa berperan sebagai aktor utama yang merumuskan kebijakan, mengorganisasikan program, dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Peran pemerintah yang kuat menjadi penting terutama ketika kapasitas masyarakat masih terbatas dan belum mampu mengelola program secara mandiri. Namun, dominasi pemerintah juga memiliki risiko, yaitu munculnya pola pembangunan yang cenderung *top-down* sehingga masyarakat lebih banyak berperan sebagai pelaksana daripada pengambil keputusan. Akibatnya, partisipasi yang terbentuk sering kali bersifat administratif dan belum mampu menciptakan rasa memiliki yang kuat terhadap program. Kondisi ini menyebabkan keberlanjutan program sangat bergantung pada keberadaan pemerintah dan dukungan eksternal.

Berbeda dengan kasus tersebut, penelitian Murdiana Asih Heningtyas *et al.* (2014) tentang Kampung Inggris di Kabupaten Kediri menunjukkan model masyarakat dominan. Dalam kasus ini, masyarakat menjadi penggerak utama pengembangan pendidikan nonformal melalui pendirian lembaga kursus, pengembangan metode pembelajaran, penyediaan fasilitas pendukung, serta pengelolaan berbagai kegiatan pendidikan secara mandiri. Pemerintah berperan lebih sebagai fasilitator daripada pengendali program. Tingginya keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pengembangan program menciptakan rasa kepemilikan yang kuat terhadap kegiatan pendidikan yang dijalankan. Selain itu, masyarakat memperoleh manfaat langsung berupa peningkatan pendapatan, terbukanya peluang usaha, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kondisi tersebut menjadikan partisipasi masyarakat lebih berkelanjutan karena didukung oleh kepentingan bersama, manfaat nyata, dan kelembagaan lokal yang berkembang secara mandiri.

Keberhasilan Kampung Inggris menunjukkan bahwa partisipasi berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh tingkat keterlibatan masyarakat, tetapi juga oleh keberadaan kapasitas lokal dan kelembagaan yang mampu menopang program dalam jangka panjang. Keberadaan lembaga kursus yang dikelola masyarakat, jaringan usaha pendukung, inovasi pembelajaran, serta manfaat ekonomi yang dirasakan secara langsung menjadi faktor yang memperkuat keberlanjutan program. Namun demikian, model masyarakat dominan juga memiliki tantangan, seperti meningkatnya persaingan antar lembaga, potensi komersialisasi pendidikan, munculnya kesenjangan ekonomi antar pelaku usaha, serta perubahan nilai sosial akibat tingginya interaksi dengan

masyarakat luar. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat yang tinggi tetap memerlukan tata kelola yang baik agar tujuan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara seimbang (Heningtyas *et al.*, 2014).

Berdasarkan kedua kasus tersebut, dapat dipahami bahwa tidak ada satu model yang sepenuhnya ideal untuk diterapkan dalam seluruh konteks masyarakat. Model pemerintah dominan dapat menjadi pilihan ketika kapasitas masyarakat masih rendah, tetapi berisiko menghasilkan partisipasi yang bersifat semu apabila masyarakat tidak diberi ruang dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, model masyarakat dominan mampu menghasilkan partisipasi yang lebih berkelanjutan apabila masyarakat memiliki kapasitas, sumber daya, dan kelembagaan yang memadai. Oleh karena itu, model kolaboratif menjadi alternatif yang paling relevan dalam pendekatan *community development*, di mana pemerintah berperan sebagai fasilitator, pendamping, dan penyedia dukungan kebijakan, sementara masyarakat berfungsi sebagai penggerak utama yang menentukan arah dan keberlanjutan program.

Dalam konteks pendidikan, model kolaboratif memungkinkan terjadinya pembagian peran yang seimbang antara pemerintah, lembaga pendidikan, fasilitator, dan masyarakat. Pemerintah menyediakan regulasi, pendanaan, serta dukungan teknis, sedangkan masyarakat berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar, merancang program, melaksanakan kegiatan, dan mengevaluasi hasil yang dicapai. Melalui pola tersebut, pendidikan tidak hanya menjadi instrumen pelayanan publik, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan yang mampu membangun kapasitas, kontrol, dan kemandirian masyarakat. Dengan demikian, partisipasi berkelanjutan dapat tumbuh karena masyarakat tidak sekadar menjadi penerima manfaat, tetapi menjadi pemilik dan pengelola program pendidikan itu sendiri.

6. Keterkaitan dengan Manajemen Pendidikan

Jika dilihat dari sudut pandang manajemen pendidikan, ide mengenai pengembangan masyarakat yang diungkapkan oleh Lubis (2021), menekankan perlunya tata kelola yang terencana, sistematis, dan berfokus pada pemberdayaan. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dari manajemen pendidikan yang mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan pendidikan dengan efektif. Dalam hal ini, pengembangan masyarakat tidak hanya dianggap sebagai kegiatan sosial semata, tetapi juga sebagai suatu proses manajerial yang melibatkan pengelolaan sumber daya manusia, program, dan lingkungan pembelajaran dengan struktur yang jelas.

Dijelaskan bahwa penguatan komunitas memiliki tujuan untuk memperbesar kemampuan individu dan kelompok sehingga dapat mandiri dan terlibat aktif dalam pembangunan. Saat dihubungkan dengan manajemen pendidikan, ini sesuai dengan sasaran pendidikan itu sendiri, yaitu meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui

proses pembelajaran yang berkelanjutan. Dengan kata lain, manajemen pendidikan tidak hanya terpaku pada aktivitas di dalam sekolah, namun juga meliputi usaha pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem pendidikan yang lebih menyeluruh (Lubis, 2021).

Selain itu, metode partisipatif yang menjadi dasar pengembangan komunitas juga berkaitan erat dengan ide manajemen pendidikan yang berfokus pada masyarakat. Dalam aplikasi nyata, partisipasi masyarakat dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan dapat meningkatkan kaitan dan efektivitas dari program tersebut. Oleh karena itu, menurut pandangan Lubis (2021), mengindikasikan bahwa kesuksesan sebuah program, baik dalam konteks pengembangan komunitas maupun pendidikan, sangat bergantung pada keterampilan manajerial dalam menggabungkan partisipasi, pemberdayaan, dan pengelolaan sumber daya dengan efisien.

Manajemen pendidikan tidak hanya berfungsi mengelola lembaga pendidikan secara internal, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam membangun masyarakat. Keberhasilan lembaga pendidikan bergantung pada pengelolaan berbagai komponen seperti kurikulum, personalia, peserta didik, sarana-prasarana, keuangan, administrasi, dan hubungan masyarakat (*public relations*). Semua komponen tersebut diarahkan agar lembaga mampu membangun kemitraan dengan masyarakat, industri, alumni, dan stakeholder lainnya (Syahrul Fauzi & Nidaul Fajrin, 2022). Syahrul Fauzi & Nidaul Fajrin juga menekankan bahwa manajemen humas menjadi jembatan utama antara sekolah dan masyarakat. Informasi yang terbuka, komunikasi yang berkelanjutan, dan keterlibatan stakeholder mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan lembaga pendidikan. Maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan masyarakat terjadi ketika manajemen pendidikan mampu membangun kolaborasi sekolah-masyarakat dan menghasilkan SDM yang berkualitas.

Menurut Nabilla Syifa Andiani *et al.* (2022) dalam penelitiannya di SDIT Miftahul Diniyah menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan masyarakat terjadi karena adanya hubungan sekolah dengan masyarakat yang terjalin secara baik, komunikasi yang terbuka, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung aktivitas sekolah. Sekolah dipandang sebagai *open system* yang tidak dapat berjalan tanpa dukungan masyarakat. Pengembangan masyarakat dilakukan melalui partisipasi orang tua, penyediaan lingkungan belajar yang aman, serta program pendidikan formal maupun nonformal yang menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan minat masyarakat terhadap pendidikan di sekolah tersebut tergolong tinggi karena adanya manajemen hubungan masyarakat yang baik. Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan yang berbasis partisipasi masyarakat mampu meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan.

7. Studi Kasus Penerapan Pengembangan Masyarakat di Indonesia

Analisis terhadap beberapa kasus membuktikan bahwa kesuksesan pengembangan komunitas dalam sektor pendidikan sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat, kemampuan lembaga lokal, serta mutu manajemen program. Perbandingan antara Kampung Inggris di Kabupaten Kediri, program desa wisata, dan KUPS Wisata Rengganis mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dapat berimbas berbeda tergantung pada sejauh mana mereka memiliki kontrol atas proses pengembangan. Hasil ini menunjukkan bahwa partisipasi yang berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan keterlibatan masyarakat, tetapi juga dengan kapabilitas mereka dalam mengelola dan mempertahankan program yang telah diciptakan (Nasdian, 2014; Saepudin & Mulyono, 2019).

Pada studi kasus di Kampung Inggris, masyarakat berperan sebagaimana aktor utama dalam merancang, mengembangkan, dan mengelola berbagai lembaga kursus bahasa Inggris. Keterlibatan masyarakat yang tinggi mengarah pada inovasi dalam pendidikan, memperkuat lembaga lokal, serta menciptakan keuntungan ekonomi yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kondisi ini mencerminkan partisipasi yang substansial karena masyarakat tidak sekadar menjadi pelaksana, tetapi juga memiliki kontrol atas arah pengembangan program. Adanya kursus, asrama, layanan transportasi, dan berbagai usaha pendukung lainnya menciptakan ekosistem pendidikan yang relatif mandiri dan berkelanjutan (Heningtyas, 2014).

Berbeda dengan Kampung Inggris, beberapa inisiatif desa wisata masih menunjukkan dominasi kepada pemerintah dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program.

Meskipun program tersebut mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, keterlibatan warga dalam menentukan arah pengembangan program masih relatif terbatas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa partisipasi yang terbentuk cenderung bersifat instrumental, yaitu masyarakat terlibat dalam pelaksanaan program tetapi belum memiliki kontrol yang memadai terhadap proses maupun keberlanjutannya (Syaifudin & Ma'ruf, 2022).

Sementara itu, kasus KUPS Wisata Rengganis menunjukkan perspektif menarik tentang pengembangan komunitas sebagai proses belajar bagi masyarakat. Walaupun menitikberatkan pada pengelolaan pariwisata yang berlandaskan pada kehutanan sosial, program ini sangat terkait dengan pendidikan karena berperan sebagai wadah pendidikan nonformal yang bersifat masyarakat. Melalui berbagai aktivitas pengelolaan pariwisata, masyarakat mendapatkan peluang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mendukung peningkatan kapasitas individu maupun kelompok. Proses ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya terjadi di lembaga

pendidikan formal, tetapi juga melalui pengalaman sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat (Puteri dan Puspaningrum, 2024; Mubarok, 2024).

Dalam pelaksanaannya, KUPS Wisata Rengganis mendorong pembelajaran sosial dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan organisasi, perlindungan lingkungan, layanan pariwisata, dan pengembangan usaha ekonomi yang produktif. Program ini juga memberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas para anggotanya melalui pelatihan, transfer keterampilan organisasi, kepemimpinan, manajemen, dan kewirausahaan. Dengan demikian, KUPS tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk pemberdayaan ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan masyarakat yang mendorong pengembangan kemandirian, kemampuan berkolaborasi, dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan (Puteri dan Puspaningrum, 2024).

Namun, situasi di KUPS Wisata Rengganis menunjukkan bahwa untuk menjaga keberlanjutan program, diperlukan dukungan kapasitas yang cukup. Beberapa masalah seperti kurangnya pelatihan yang merata, keterbatasan dalam manajemen, dan minimnya sumber daya manusia dapat menjadi hambatan bagi pengembangan program jangka panjang.

Penemuan ini mengindikasikan bahwa sekadar partisipasi tidaklah mencukupi; keberhasilan pembangunan komunitas juga bergantung pada penguatan struktur organisasi, peningkatan keterampilan anggotanya, serta adanya sistem pembelajaran yang berkelanjutan agar masyarakat dapat mengelola program secara mandiri (Puteri & Puspaningrum, 2024; Zubaedi, 2016).

Dengan membandingkan ketiga kasus tersebut, dapat dipahami bahwa keberlanjutan partisipasi tidak hanya bergantung pada kehadiran masyarakat dalam program, melainkan juga pada tingkat akses, kapasitas, legitimasi, dan kontrol yang dimiliki masyarakat dalam setiap fase program. Semakin besar rasa kepemilikan masyarakat terhadap program, semakin tinggi pula kemungkinan tercapainya keberlanjutan. Oleh sebab itu, pembangunan komunitas dalam pendidikan harus dilihat sebagai suatu proses manajerial dan pembelajaran sosial yang bertujuan untuk membentuk masyarakat yang mampu mengelola perubahan secara mandiri dan berkelanjutan (Lubis, 2021; Fauzi & Fajrin, 2022; Nasdian, 2014).

Jika dilihat secara keseluruhan, ketiga contoh menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang bervariasi. Kampung Inggris menunjukkan partisipasi yang signifikan karena komunitas memiliki peranan penting dalam perancangan, pengelolaan, sampai pengembangan program yang menghasilkan keberlanjutan yang cukup kuat. Dalam kasus desa wisata, partisipasi masyarakat telah ada, tetapi masih terdapat ketergantungan kepada pemerintah sehingga pengawasan masyarakat terhadap program tersebut belum sepenuhnya maksimal. Di sisi lain, KUPS Wisata Rengganis

menunjukkan bahwa partisipasi komunitas telah berkembang dengan baik melalui keikutsertaan dalam pengelolaan pariwisata dan proses pembelajaran sosial, namun masih menghadapi masalah di bidang manajemen organisasi dan kapasitas sumber daya manusia. Perbandingan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan komunitas dalam bidang pendidikan tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar keterlibatan masyarakat, tetapi juga oleh kemampuan lembaga lokal, kualitas pengelolaan program, serta kemampuan komunitas untuk mempertahankan dan mengembangkan program dengan cara mandiri dan berkelanjutan.

Simpulan

Community development dalam pendidikan merupakan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pembangunan melalui partisipasi aktif, pemberdayaan, dan penguatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga pada pengembangan kualitas sosial, budaya, dan pendidikan masyarakat agar mampu mandiri dalam menghadapi berbagai perubahan sosial. Dalam konteks pendidikan, *community development* memiliki peran penting karena pendidikan menjadi sarana strategis untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi *community development* dalam pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, pendekatan program yang masih bersifat top-down, kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan, serta lemahnya keberlanjutan program pemberdayaan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pendidikan. Padahal, partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor utama dalam menciptakan program pendidikan yang relevan, efektif, dan berkelanjutan.

Selain itu, keberhasilan pengembangan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mengelola program berbasis kebutuhan lokal. Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat pada setiap tahapan pengembangan terbukti mampu meningkatkan rasa memiliki, kapasitas sosial, serta kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, *community development* dalam pendidikan perlu dikembangkan melalui penguatan manajemen program, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pembangunan kerja sama yang berkelanjutan antar berbagai pihak. Dengan demikian, pendidikan dapat berfungsi tidak hanya sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan partisipasi yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan.

Referensi

- Abdurrahman. (2024). Metode Penelitian Kepustakaan dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*. 3 (2).
- Agustana, P. (2020). Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Strategi dalam Pembangunan Sosial. *Locus Majalah Ilmiah FISI*. 12(1).
- Andiani, S. N., Kosim, A., & Waluyo, K. E. (2022). Peran Pendidikan dalam Pengembangan Masyarakat Di SDIT Miftahul Diniyah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 405-415. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/2144>
- Fauzi, S., & Fajrin, N. (2022). Peran Manajemen Pendidikan Islam Dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Dan Masyarakat. *Heutagogia: Journal of Islamic Education*, 2(1), 17-32. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/HJIE/article/view/4785>
- Hamid, H. (2018). Manajemen pemberdayaan masyarakat.
- Hermawan, Y., & Suryono, Y. (2016). Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program-program pusat kegiatan belajar masyarakat Ngudi Kapinteran. *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 3(1), 97-108.
- Heningtyas, M. A. (2014). *Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Upaya Pengembangan Pendidikan Nonformal (Studi Kasus: Eksistensi" Kampung Inggris" Kabupaten Kediri)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Juabdin Sada, H. (2017). Peran masyarakat dalam pendidikan perspektif pendidikan Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 117–125.
- Laksono, B. A., & Rohmah, N. (2019). Pemberdayaan masyarakat melalui lembaga sosial dan pendidikan. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 14(1).
- Lubis, Z. (2021). Management Of Community Development Da'wah: Manajemen Dakwah Pengembangan Masyarakat. *Jurnal Bina Ummat: Membina dan Membentengi Ummat*, 4(1), 1-11.
- Mubarok, A. K. (2024). Pendidikan dan perkembangan masyarakat perspektif John Dewey. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 11(3).
- Muslim, A. (2012). *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Mustanir, A., Ramlan, P., Razak, M. R. R., Mursalat, A., Sundari., Hardianti., Irwan, M., Aksan, M., & Sellang, K. (2025). *Pemberdayaan masyarakat: Konsep, strategi, dan implementasi*. Eureka Media Aksara.
- Nasdian, F. T. (2014). *Pengembangan masyarakat*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Normina. (2016). Partisipasi masyarakat dalam pendidikan. *Ittihad: Jurnal Kopertais*

Wilayah XI Kalimantan, 14(26).

- Puteri, W. & Puspaningrum, D. (2024). Penerapan Model Pengembangan Masyarakat Lokal Melalui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Wisata Rengganis dalam Program Perhutanan Sosial di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember. *Jurnal Agribest*, 8(1), 26-37.
<https://ejurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/AGRIBEST/article/view/1700>
- Saepudin, A., & Mulyono, D. (2019). Community education in community development. *Journal Empowerment*, 8(1), 65–73.
- Sucipto, S., Nasih, A. M., Raharjo, K. M., & Fatihin, M. K. (2024). How does community education encourage sustainable development?. *Journal Cakrawala Pendidikan*, 43(2), 328–343.
- Syaifudin, M. Y., & Ma'ruf, M. F. (2022). Peran pemerintah Desa dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui Desa wisata (studi Di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo). *Publika*, 365-380.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/44661>
- Zubaedi, M. A. (2016). *Pengembangan masyarakat: wacana dan praktik*. Kencana.
- Hermawan, Y., & Suryono, Y. (2016). Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program-program pusat kegiatan belajar masyarakat Ngudi Kapinteran. *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 3(1), 97–108.
<https://doi.org/10.21831/jppm.v3i1.8111>
- Normina. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. *ITTIHAD*, 14(26).
<https://doi.org/10.18592/ittihad.v14i26.874>
- Agustana, P. (2020). Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat sebagai Strategi dalam Pembangunan Sosial. *Locus*, 12(1). <https://doi.org/10.37637/locus.v12i1.288>
- Sada, H. J. (2017). Peran Masyarakat Dalam Pendidikan Perspektif Pendidikan Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i1.2120>